



Pedagang Asongan Persoalkan Otoped Listrik

Tunggu Aturan, Pemkot Klaim Akan Fasilitasi Keduanya

JOGJA, Radar Jogja - Pascarelokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, pedagang asongan mempersoalkan penyewaan otoped listrik yang masih beroperasi. Sementara 181 pedagang asongan, dilarang berkeliling di sepanjang Jalan Malioboro.

Ketua Komunitas Asongan Malioboro Raden Ridwan Suryo Bintoro menilai hal tersebut tidak adil. Sebab ada pihak lain yang diizinkan berkegiatan ekonomi di sana, pun tanpa legalitas. "Kami ingin adanya keadilan secara sosial. Pengusaha skuter diperbolehkan di sana, juga tidak ada aspek legalitasnya," kata Ridwan belum lama ini.

Dia pun merasa, kebijakan yang ada hanya berpihak kepada pemodal besar. Sementara para pedagang asongan yang merupakan rakyat kecil dan tumbuh bersama PKL di Malioboro, justru tersingkirkan. "Kami rakyat kecil tersingkirkan yang meminta keadilan," ujarnya.

Diketahui, tambah Ridwan, pe-

dagang asongan sudah dilarang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro sejak 1 Februari. Informasi larangan itu, tidak diterimanya secara resmi. Melainkan hanya spontanitas dari petugas Jogoboro.

Tidak hanya dari pedagang asongan, keluhan operasional otoped listrik juga datang dari wisatawan. Bahkan, permasalahan ini sudah berulang kali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Karena jumlah yang terlalu banyak, dan terkadang memenuhi trotoar. Tidak jarang, pengendara otoped listrik yang terkesan ugall-ugalan pun terus menjadi sorotan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) menuturkan, akan meminta dinas kebudayaan (disbud) untuk melakukan monitoring keberadaan pedagang asongan. Seiring menunggu aturan otoped listrik diperbaharui, tidak menutup kemungkinan para pedagang asongan juga akan difasilitasi.

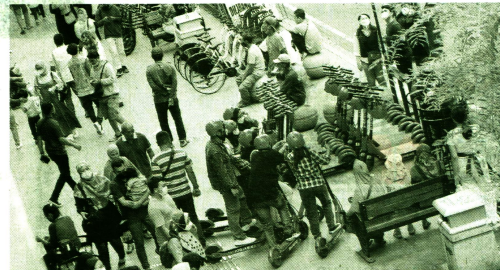
Namun, lanjutnya, hal ini masih akan dikordinasikan dengan matang. Mengingat selama ini, pedagang asongan tidak terorganisasi dan terdeteksi. "Karena waktu itu nggak kelihatan seolah-olah

bagian dari PKL. Maka sekarang kita minta disbud melihat, menerima semua masukan asongan, dan fasilitasi apa yang masih bisa dilakukan untuk mereka itu," ungkapnya.

HP mengaku, saat ini aturan operasional otoped listrik juga masih ditata. Mengingat banyaknya keluhan yang datang dari wisatawan. "Ini sedang kita susun aturannya," tegasnya.

HP menjelaskan, teranyar Pemkot sudah menggelar *focus group discussion* (FGD) bersama pihak terkait, termasuk seluruh pengelola persewaan otoped listrik di Malioboro. Hasil koordinasi tersebut, penyedia jasa pun tak keberatan untuk ditata. "Pasti nanti akan ada aturannya," ujarnya.

Memurutnya, aturan tersebut menyangkut jumlah otoped yang boleh beroperasi dalam satu waktu. Pembatasan jam aktivitas, hingga rute-rute yang boleh dilalui penyewa. Dengan demikian, tak akan mengganggu aktivitas pejalan kaki di Malioboro. "Ini sedang kita tunggu finalisasinya. Sudah sampai ke disbud dan asisten sekda, tinggal dilihat dari aspek hukum dan segala macam, baiknya seperti apa itu nanti," bebemnya. (wia/eno/rg)



KEADILAN: Wisatawan mengendarai otoped listrik di kawasan Malioboro, Jogja, beberapa waktu lalu. Pedagang asongan mempersoalkan penyewaan otoped listrik yang masih beroperasi. Sementara asongan dilarang berjalan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005